



GINI RATIO & DISTRIBUSI PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA 2017





GINI RATIO & DISTRIBUSI PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA 2017



GINI RATIO & DISTRIBUSI PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA 2017

No. Publikasi : 82520.1814

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : iii + 9

Naskah : Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh : © BPS Provinsi Maluku Utara

Dicetak oleh : BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Kata Pengantar

Distribusi pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator makroekonomi yang memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Ketersediaan data dan informasi kemiskinan serta distribusi pengeluaran yang berkualitas berguna dalam perencanaan pembangunan pada program penanggulangan kemiskinan.

Distribusi pengeluaran terkristalisasi pada tingkat ketimpangan penduduk yang menggambarkan perbedaan tingkat pengeluaran masyarakat antar kelas pengeluaran. Melalui booklet ini, akan ditampilkan ukuran distribusi pengeluaran di Maluku Utara Tahun 2017 yang tercermin melalui *Gini Ratio*.

Kami berharap booklet ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dalam menyusun program-program terkait maupun evaluasi.

Ternate, November 2018
Kepala BPS Provinsi
Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan.....	1
Metodologi... ..	2
Keadaan Ketimpangan di Maluku Utara.....	4
Daftar Pustaka.....	9

<https://maluku.bps.go.id>

Pendahuluan

Pengukuran ketimpangan pendapatan sudah dimulai sejak Pareto menyampaikan hipotesisnya bahwa distribusi pendapatan tidak memiliki kurva yang mengikuti distribusi normal. Pareto menyatakan bahwa ketimpangan merupakan keadaan dimana kelompok penduduk terkaya memperoleh porsi terbanyak dari pendapatan nasional. Artinya, antar kelompok masyarakat terjadi perbedaan proporsi pendapatannya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas.

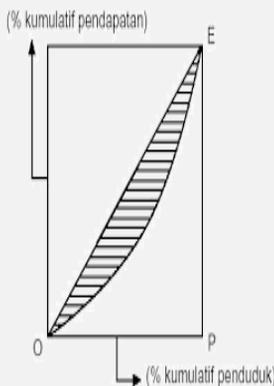
Dalam booklet ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia.





Gini Ratio

Grafik 1. Gini Ratio menurut Kurva Lorentz



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini berada diantara 0 dan 1, dimana semakin tinggi Gini Ratio maka semakin tinggi tingkat ketimpangan.

Rumus Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

G = Koefisien Gini (Gini Ratio)

X = Proporsi kumulatif dari penduduk

k untuk k = 0,1,2,... n

dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$

Y = Proporsi kumulatif dari pengeluaran

k untuk k = 0,1,2,... n

dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$

Ukuran World Bank

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.

Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.



Keadaan Ketimpangan di Maluku Utara

Gini Ratio

0,317 MARET 2017

0,330 SEPTEMBER 2017

Gini Ratio pada September 2017 naik 0,013 poin dibandingkan keadaan Maret 2017.

Baik keadaan Maret 2017 ataupun September 2017, Gini Ratio Maluku Utara masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Nasional sebesar 0,391 (September 2017) dan 0,393 (Maret 2017).

Grafik 2. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah, 2013 - 2017



Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. *Gini Ratio* pada September 2013 sebesar 0,320, mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2014 menjadi 0,325 dan pada September 2014 menjadi 0,322. Kemudian, *Gini Ratio* menurun menjadi 0,280 pada Maret 2015. Pada September 2015, terjadi sedikit kenaikan *Gini Ratio* menjadi 0,286. *Gini Ratio* pada September 2017 tercatat sebesar 0,330 meningkat 0,013 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada Maret 2017 sebesar 0,317. Kemudian pada September 2017 kembali meningkat menjadi 0,330.

Tabel 1. Perkembangan Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	0,223	0,249	0,234	0,258	0,238
Halmahera Tengah	0,257	0,339	0,322	0,265	0,291
Kepulauan Sula	0,267	0,295	0,298	0,262	0,257
Halmahera Selatan	0,274	0,303	0,244	0,209	0,265
Halmahera Utara	0,253	0,312	0,291	0,257	0,235
Halmahera Timur	0,248	0,271	0,264	0,266	0,318
Pulau Morotai	0,315	0,288	0,269	0,241	0,288
Pulau Taliabu	-	-	0,233	0,273	0,243
Ternate	0,254	0,293	0,245	0,270	0,281
Tidore Kepulauan	0,257	0,222	0,205	0,227	0,227
Maluku Utara	0,315	0,324	0,280	0,286	0,317

Diolah dari Susenas 2013 - 2017

Data tingkat kabupaten hanya tersedia pada Susenas Maret

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki Gini Ratio berkisar di antara 0,2 hingga 0,3 dan masih dibawah angka nasional.

Tabel 2. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan *World Bank* menurut Daerah, 2016 - 2017

Daerah/ Periode	Kategori Kelompok Penduduk Berdasarkan Pengeluaran		
	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2016	15,91	36,74	47,35
Maret 2017	19,92	40,16	39,92
September 2017	19,04	40,92	40,04
Perdesaan			
Maret 2016	20,40	38,50	41,10
Maret 2017	24,14	38,79	37,07
September 2017	23,29	38,77	37,94
Perkotaan+ Perdesaan			
Maret 2016	17,02	36,09	46,89
Maret 2017	21,35	37,54	41,11
September 2017	20,41	37,61	41,97

Tabel di atas menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk per kapita menurut ukuran *World Bank*. Pada Maret 2017 proporsi pengeluaran penduduk yang berada pada kategori penduduk 40 persen terbawah yaitu sebesar 21,35. Kemudian pada September 2017, angka tersebut sedikit turun menjadi 20,41. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari batas 17 persen dan berarti ketimpangan rendah.

Proporsi pengeluaran penduduk di perkotaan dan di perdesaan pun lebih dari 17 persen, artinya bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Maluku Utara termasuk kategori rendah.

Tabel 3. Perkembangan Distribusi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan World Bank menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Kategori Kelompok Penduduk Berdasarkan Pengeluaran		
	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	25,57	39,15	35,28
Halmahera Tengah	22,77	38,14	39,09
Kepulauan Sula	24,72	38,5	36,78
Halmahera Selatan	24,24	38,2	37,57
Halmahera Utara	26,18	38,71	35,1
Halmahera Timur	20,52	39,45	40,03
Pulau Morotai	22,68	38,84	38,48
Pulau Taliabu	24,03	41,96	34,01
Ternate	23,11	38,98	37,91
Tidore Kepulauan	25,95	39,96	34,09
Maluku Utara	21,35	37,54	41,11

Diolah dari Susenas 2013 - 2017

Data tingkat kabupaten hanya tersedia pada Susenas Maret

Secara umum kondisi ketimpangan di semua kabupaten/kota di Maluku Utara termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk 40 persen terbawah memiliki nilai di atas 17 persen.



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. Jakarta : BPS RI.
- Badan Pusat Statistik . 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. Jakarta : BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2017. *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016*. Ternate : BPS Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2018. *Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maluku Utara September 2017*. Ternate : BPS Provinsi Maluku Utara.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Stadion No. 65 Ternate 97712 Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : malut@bps.go.id